

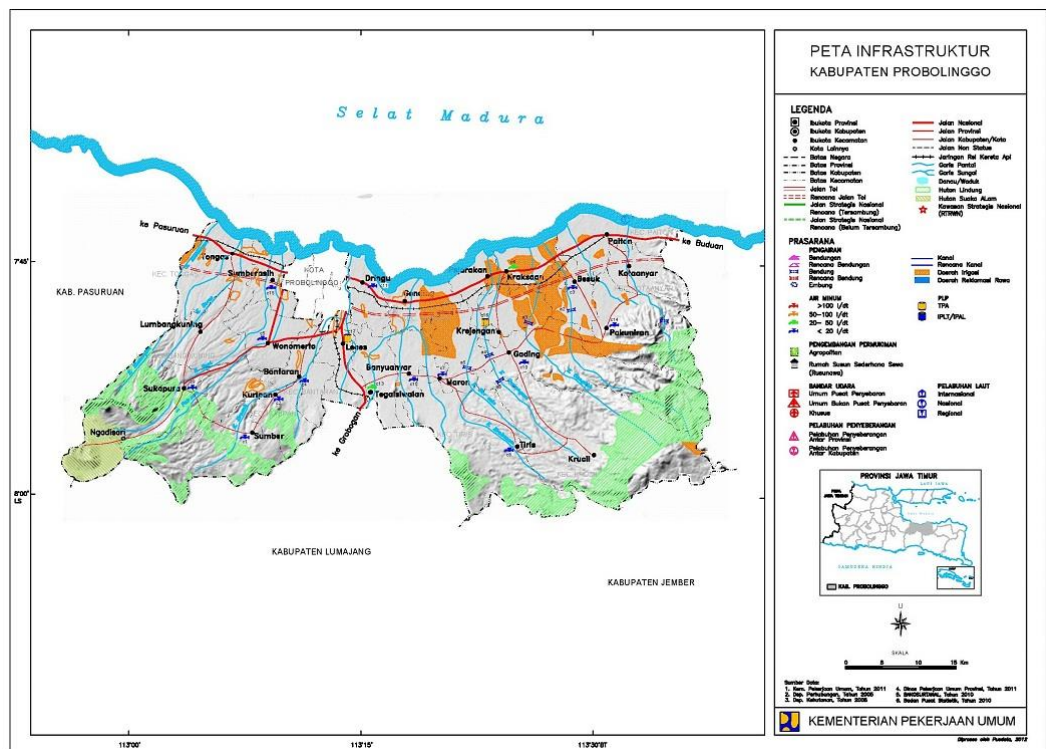
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo

Pada Bab III ini penulis mengambil data dari website Kabupaten Probolinggo dan buku Profil dar Kabupaten Probolinggo yang di dalamnya ada juga mengenai profil dari Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi.

Gambar 1 : Kabupaten Probolinggo



Sumber : Google Maps Tahun 2022

1. Sejarah Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini dikelilingi oleh Gunung Semeru, Gunung Argopuro, dan Pegunungan Tengger. Kabupaten Probolinggo mempunyai semboyan “Prasaja Ngesti Wibawa”. Makna semboyan : Prasaja berarti : bersahaja, blaka, jujur, bares, dengan terus terang, Ngestiberarti : menginginkan, menciptakan, mempunyai tujuan, Wibawa berarti : mukti, luhur, mulia. “Prasaja Ngesti Wibawa”berarti : Dengan rasa tulus ikhlas (bersahaja, jujur, bares) menuju kemuliaan.

Ketika seluruh Wilayah Nusantara dapat dipersatukan di bawah kekuasaan Majapahit tahun 1357 M (1279 Saka), Patih Gajah Mada telah dapat mewujudkan ikrarnya dalam Sumpah Palapa, menyambut keberhasilan ini, Raja Hayam Wuruk berkenan berpesiar keliling negara. Perjalanan muhibah ini terlaksana pada tahun 1359 M (1281 Saka).

Menyertai perjalanan bersejarah ini, Empu Prapanca seorang pujangga ahli sastra melukiskan dengan kata-kata, Sang Baginda Prabu Hayam Wuruk merasa suka cita dan kagum, menyaksikan panorama alam yang sangat mempesona di kawasan yang disinggahi ini. Masyarakatnya ramah, tempat peribadatannya anggun dan tenang, memberikan ketenteraman dan kedamaian serta mengesankan. Penyambutannya meriah aneka suguhan disajikan, membuat Baginda bersantap dengan lahap. Taman dan darma pasogatan yang elok permai menyebabkan Sang Prabu terlena dalam kesenangan dan menjadi kerasan.

Ketika rombongan tamu agung ini hendak melanjutkan perjalanan, Sang Prabu diliputi rasa sedih karena enggan untuk berpisah. Saat perpisahan diliputi rasa duka cita, bercampur bangga. Karena Sang Prabu Maha Raja junjungannya berkenan mengunjungi dan singgah berlama-lama di tempat ini. Sejak itu warga di sini menandai tempat ini dengan sebutan Prabu Linggih. Artinya tempat persinggahan Sang Prabu sebagai tamu Agung. Sebutan Prabu Linggih selanjutnya mengalami proses perubahan ucap hingga kemudian berubah menjadi Probo Linggo. Maka sebutan itu kini menjadi Probolinggo.

Pada zaman pemerintahan Prabu Radjasanagara (Sri Nata Hayam Wuruk), Raja Majapahit yang ke IV (1350-1389), Probolinggo dikenal dengan nama “Banger”, yaitu nama sebuah sungai yang mengalir di tengah daerah. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Akuwu di Sukodono. Nama Banger sendiri dikenal dari buku Negarakertagama yang ditulis oleh pujangga kerajaan Majapahit yang terkenal yaitu Mpu Prapanca.

Dalam upaya mendekatkan diri dengan rakyatnya, maka Prabu Hayam Wuruk dengan didampingi Patih Amangku Bumi Gajah Mada melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah antara lain Lumajang dan Bondowoso. Perjalanan tersebut dimaksudkan agar Sang Prabu dapat melihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat di peDesaan dan sekaligus melihat sejauhmana pemerintahnya dapat dilaksanakan oleh para pembantunya. Dalam perjalanan inspeksi tersebut Prabu Hayam Wuruk singgah di Desa Banger, Desa Baremi, dan Desa Borang. Desa tersebut sekarang ini menjadi bagian wilayah administrasi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo (Kelurahan Sukabumi, Mangunharjo, Wiroborang).

Singgahnya Prabu Hayam Wuruk di Desa Baremi, Banger dan Borang, disambut masyarakat sekitar dengan penuh sukacita. Pada hari Kamis Pahing (Respati Jenar) tanggal 4 september 1359 Masehi, Prabu Hayam Wuruk memerintahkan kepada rakyat Banger agar memperluas Banger dengan membuka hutan yang ada di sekitarnya yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Perintah itulah yang akhirnya menjadi landasan sejarah hari lahirnya Kota Probolinggo.

Banger mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini ternyata menarik perhatian dari Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan yang berkuasa. Hingga pada akhirnya Banger dapat dikuasai oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger pernah menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramardhana (Majapahit) yang dikenal dengan “Perang Paregreg”.

2. Data Nama dan Wilayah

Nama Resmi : Kabupaten Probolinggo

Ibu Kota : Kraksaan

Provinsi Jawa Timur

Batas Wilayah

Utara : Selat Madura

Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang

Barat : Kabupaten Pasuruan

Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember

Utara Bagian Tengah : Kota Probolinggo

Luas Wilayah : 169.616,65 Ha atau + 1.696,17 Km²

Jumlah Penduduk : 1.092.036 jiwa (Sensus Penduduk 2008)

Wilayah Administrasi :

Kecamatan 24

Desa 325

Kelurahan 5

3. Kondisi Geografis

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 112°50' – 113°30' Bujur Timur (BT) dan 7°40' – 8°10' Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau + 1.696,17 km² (1,07 % dari luas daratan dan lautan Propinsi Jawa Timur).

Dengan rincian sebagai berikut :

Permukiman : 147,74 Km²

Persawahan : 373,13 Km²

Tegal : 513,80 Km²

Perkebunan : 32,81 Km²

Hutan : 426,46 Km²

Tambak/Kolam : 13,99 Km²

Pulau Gili Ketapang : 0,60 Km²

Lain-lain : 188,24 Km²

Dilihat dari geografisnya Kabupaten Probolinggo terletak di lereng pegunungan yang membujur dari Barat ke Timur, yaitu Gunung Semeru, Argopuro, Lamongan dan Tengger. Selain itu terdapat gunung lainnya, yaitu Gunung Bromo,

Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang dan Batuajar. Dilihat dari ketinggian berada pada 0-2500 m diatas permukaan laut dengan temperatur rata-rata 27°C – 30°C.

Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga bulan Oktober dengan rata-rata curah hujan + 29,5 mm per hari hujan, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga bulan April dengan rata-rata curah hujan + 229 mm per hari hujan. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret dengan rata-rata curah hujan + 360 mm per hari hujan. Diantara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba yang biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang berhembus dari arah Tenggara ke Barat Laut biasa disebut “Angin Gending”

Selain itu Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa obyek wisata yaitu Gunung Bromo, Air Terjun Madakaripura, Pulau Gili Ketapang dengan taman lautnya, Pantai Bentar, Arum Jeram Sungai Pekalen, Ranu Segaran dan Sumber Air Panas serta Candi Jabung yang mencerminkan kejayaan masa lalu.

Adapun pembagian wilayah administratif, secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 24 wilayah Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurahan, 1.642 Rukun Warga (RW) dan 5.864 Rukun Tetangga (RT)

4. Topografi

Secara topografi Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda.

Bentuk permukaan daratan diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

- Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0-100 M diatas permukaan air laut, daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke arah Timur kemudian membujur ke Selatan.
- Daerah perbukitan dengan ketinggian 100-1.000 M diatas permukaan air laut, daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang kaki Gunung Semeru dan Pegunungan Tengger serta pada bagian Utara sisi bagian Timur sekitar Gunung Lamongan.
- Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 M dari permukaan air laut, daerah ini terletak di sebelah barat daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan disebelah Tenggara yaitu di sekitar Pegunungan Argopuro.

Sedangkan jumlah sungai yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo antara lain terdiri dari Sungai Pekalen, Pancarglagas, Krasak, Kertosuko, Rondoningo, Pendil, Gending, Banyubiru, Ronggojalu, Kedunggaleng dan Patalan. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 Km, sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 Km saja. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun.

5. Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo berdasarkan penghitungan BPS pada tahun 2008 sebanyak 1.092.036 jiwa terdiri dari laki-laki 523.652 jiwa dan perempuan 568.384 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,01 %. Adapun tingkat kepadatan penduduk rata-rata 644 jiwa/Km² dengan tingkat kepadatan tertinggi di Kecamatan Sumberasih sebesar 1.907 jiwa/Km² dan tingkat kepadatan terendah sebesar 186 jiwa/Km² di Kecamatan Sumber.

Mayoritas masyarakatnya beragama Islam 95,40 %, Kristen/Protestan 1,46 %, Katolik 1,45 %, Budha 0.08 %, sedangkan masyarakat yang beragama Hindu 1,50 % tersebar di Kecamatan Sumber dan Sukapura.

Berdasarkan karakteristik daerah + 60 % mata pencaharian penduduk bekerja di sektor pertanian, sedangkan untuk daerah pantai seperti di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan daerah pegunungan memungkinkan untuk pengembangan tenaga kerja pada sektor perkebunan dengan berbagai komoditinya. Dari perkembangan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut, semakin lama peranannya cenderung menurun dan tergeser oleh sektor non pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa yang cenderung meningkat.

B. PENYAJIAN DATA FOKUS PENELITIAN

3.1 Aktor yang Terlibat dan Berkontribusi yang diberikan Oleh Para Aktordalam Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang

Pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia sejatinya memang

bertujuan untuk mewujudkan sebuah kedaulatan rakyat yang dapat membentuk pemerintahan yang baik serta dapat memberikan sebuah wadah yang dapat menampung aspirasi dan kepentingan rakyatnya. Pemilu dapat dikatakan sebagai pemilu yang sehat adalah yang dilakukan dengan jujur, terbuka, serta tanpa adanya tekanan dari orang lain. Pemilu memang sering dijadikan sebuah ajang pesta politik yang dilakukan oleh calon anggota yang memiliki modal cukup tinggi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mempengaruhi masyarakat atau rakyat dengan cara memberikan imbalan dan sebagainya. Dan pada kenyataannya, fenomena seperti itu tidak dapat dipungkiri karena saat ini prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dinilai memang sudah tidak berlaku dengan melihat kenyataan dari kegiatan pemilu yang terjadi di Indonesia (Lukmajati, 2016).

Fenomena politik uang semakin marak terjadi di masyarakat pada saat ini. Hal yang membuat politik uang terjadi di masyarakat salah satunya adalah dengan rendahnya pendidikan masyarakat terkait pengetahuan politik pada peserta pemilu ataupun kepada masyarakat yang memiliki hak pilih. Selain itu, yang membuat politik uang ini marak di masyarakat adalah kurangnya sebuah sosialisasi khusus praktek politik yang baik sehingga mengakibatkan masyarakat memiliki pola pikir yang tidak memikirkan bagaimana akibatnya. Pendidikan politik ini memang sangat diperlukan agar terciptanya proses pemilihan umum yang bersih.

Sebelum gerakan Desa anti politik uang digerakkan, pemerintah Desa Jatisari memang sudah mengalami kegelisahan terlebih dahulu. Menurut Ibu Zakiah, beliau mengatakan:

“Kegelisahan ini ada pastinya mas, seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya yang tidak hanya pilkada, pilpres dan pemilihan yang lain memang politik uang sudah menjadi sesuatu yang marak. Dari situ sampai 5 tahun tidak ada proses membangun gerakan itu untuk melakukan penolakan politik uang. Padahal gerakan lama telah bermunculan, semisal adanya kekerasan ibu dan anak lalu dibangun gerakan anti kekerasan perempuan dan anak. Setelah itu, barulah Desa berupaya dengan adanya UU Desa kemudian ada upaya untuk membangun gerakan tersebut. Dari sana, Ibu mencoba bertemu dengan komponen Desa, bertemu dengan orang-orang kampung. Mereka selalu bilang sulit tidak bisa. Jadi sebenarnya testimoni dari berawal ibu-ibu dasawisma itu adalah ‘susah bu, dari dulu sudah seperti itu, dari dulu ada dan itu sudah berlangsung’. Nah kira-kira begitu.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Juni 2022).

Dapat dilihat pada ungkapan bu Zakiah apabila gerakan Desa Anti Politik Uang ini di inisiasikan karena adanya sebuah kegelisahan yang ada di benak masyarakat Desa Jatisari. Dan sebab itulah ibu Zakiah bersama dengan beberapa komponen Desa membuat sebuah gerakan untuk mencoba untuk menyadarkan masyarakat agar terhindar dari politik uang. Selain itu, ibu Zakiah sendiri juga mengatakan jika dalam menginisiasikan gerakan ini juga memerlukan pemikiran yang panjang agar dapat menjadi gerakan yang mampu menjadi gerakan perubahan.

“Akhirnya gerakan tersebut muncul, saya memilih pilihan ini bukannya tanpa pikir panjang. Kami sebelumnya berdiskusi panjang soal pilihan itu.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Juni 2022).

Dengan hadirnya Desa Anti Politik Uang di Desa Jatisari diharapkan masyarakat Desa Jatisari dapat terdorong tekadnya untuk ikut terlibat dalam pencegahan praktik politik uang di lingkungan Desa Jatisari khususnya. Selain itu,

Ibu Zakiah bersama dengan para komponen Desa juga bersama-sama turut mensukseskan gerakan ini agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat terealisasi dengan baik di Desa Jatisari. Munculnya gerakan Desa Anti Politik Uang ini juga turut mendorong para masyarakat Desa aktif terjun dalam kegiatan pencegahan praktik politik di Desa Jatisari.

Dalam proses pembentukan gerakan Desa anti politik uang, pemerintah Desa Jatisari memberikan dukungan penuh untuk membentuk Desa anti politik uang. Pemerintah Desa Jatisari dalam mendirikan Desa anti politik uang memiliki tujuan agar dapat memberikan contoh bagi Desa-Desa yang lainnya untuk menghindari kegiatan politik uang. Dalam mendirikan Desa anti politik uang, tentu saja banyak yang harus dilalui oleh pemerintah Desa Jatisari antara lain adalah dengan mengumpulkan masyarakat Desa Jatisari terlebih dahulu untuk di berikan pendekatan terkait Desa anti politik uang dengan tujuan agar masyarakat dapat berantusias mengikuti sebuah gerakan tersebut.

Dalam berkontribusi di gerakan sosial Desa Anti Politik Uang, pemerintah Desa dalam menggerakan gerakan Desa Anti Politik Uang juga perlu melihat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana salah satu isi didalamnya berisi mengenai pemilihan umum yang diwajibkan untuk menjamin tersalurkannya suara yang diberikan masyarakat tersebut yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maksud dari hal tersebut adalah pemerintah haruslah membebaskan masyarakatnya untuk memilih tanpa harus ada paksaan dari pihak manapun melalui politik uang tersebut

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7, 2017).

Terbentuknya Desa Jatisari sebagai Desa anti politik uang merupakan kemauan warga Desa yang di inisiasi oleh ibu Zakiah sebagai motor penggerak terbentuknya Desa anti politik uang. Ibu Zakiah merupakan salah satu warga yang turut andil dalam pergerakan Desa anti politik uang ini. Tim Desa anti politik uang lahir atas prakarsa ibu Zakiah dibantu oleh Kepala Desa Jatisari bersama dengan teman teman dari KISP sebagai tim yang dipusatkan untuk membantu dalam pergerakan Desa anti politik uang yang menggandeng para warga Desa Jatisari untuk menjadi seorang pemilih yang anti melakukan politik uang serta untuk menyadarkan para warga agar tidak ikut andil dalam politik uang saat ini memang sedang marak dilakukan.

Politik uang yang sedang marak terjadi di negara Indonesia memberikan dampak yang sangat buruk bagi sistem demokrasinya, Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah permainan didalam politik yang dapat berbentuk pembelian suara atau *vote buying*, pemberian pribadi atau *individual gift*, pelayanan kesehatan dengan maksud tertentu, segala kebutuhan yang diberikan oleh masyarakat dengan maksud tertentu, serta adanya sebuah proyek *pork barrel*. Hal tersebut tentu saja diberikan dengan cara cuma cuma oleh kandidat yang akan dipilih dengan tujuan agar masyarakat memilih kandidat yang memberikan pemberian tersebut untuk menjadi seorang pemimpin.

Adanya aktor yang terlibat dalam Desa anti politik uang maka diharapkan agar Desa tersebut sukses dalam menggerakkan gerakan tersebut karena telah didukung oleh aktor yang menginisiasi gerakan tersebut. Akan tetapi, keadaannya

yaitu kurang di fasilitasi dengan maksimal oleh pihak KPU dan Bawaslu. Selain untuk menggandeng para warga dan menyadarkan para warga untuk menghindari politik uang, para aktor membuat gerakan tersebut agar terhindar dari sebuah pemimpin yang tidak jujur dan terlibat dalam politik uang. Para aktor tersebut juga memiliki tujuan lainnya yaitu untuk mencoba memutus rantai kegiatan politik uang.

Besar harapan setelah dibentuknya sebuah gerakan Desa Anti Politik Uang adalah bisa membuat Desa Jatisari menjadi lebih baik dan bersih dari politik uang. Selain itu pembentukan gerakan Desa anti politik uang juga bertujuan untuk membuat memberi kesadaran terhadap masyarakat terkait politik uang. Dan pada akhirnya, Desa Jatisari sudah resmi mendeklarasikan Desa tersebut sebagai Desa APU pada tanggal 16 Februari 2021. Pemerintah Desa Jatisari pada saat itu juga memikirkan agar gerakan ini dapat berjalan dengan efektif tentu saja turut menghadirkan banyak aktor yang terlibat untuk bertanggung jawab. Akan tetapi, apabila ditelusuri lebih jauh kembali sebenarnya memang masyarakatlah yang harus dipaksakan untuk mensukseskan gerakan ini agar turut merasa bertanggung jawab atas gerakan tersebut juga. Tetapi disamping itu juga ibu Zakiah bersama dengan jajaran pemerintah Desa Jatisari turut membantu didalamnya.

Sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam pembentukan Desa antipolitik uang, maka Pemerintah Desa Jatisari membuat Perkades atau dibuatlah sebuah landasan hukum yang telah dideklarasikan oleh Kepala Desa Jatisari pada tahun 2022 ini. Peraturan tersebut dibuat tujuannya agar gerakan anti politik uang ini memiliki legitimasi yang kuat. Setelah adanya Perkades tersebut, maka aktor

politik yang turut andil dalam gerakan tersebut lalu memberikan sebuah pendidikan dan pengetahuan mengenai pentingnya menghindari politik uang pada saat diadakannya sebuah pemilihan umum. Para aktor politik menghimbau kepada masyarakat untuk tersus berhati-hati karena saat ini permainan dalam sebuah politik memanglah sangat mudah untuk dilakukan. Apabila masyarakat masih dirasa kurang memahami pengetahuan terkait politik uang maka sangat mudah untuk dikelabui oleh para pelaku politik uang.

Sebuah gerakan Desa anti politik uang ini muncul dikarenakan adanya kerja sama antara Ibu Zakiah selaku inisiator gerakan ini dengan komponen-komponen Desa. Ibu Zakiah sendiri sebelum mencetuskan gerakan ini mengatakan:

“Gerakan apa yang memungkinkan, dan setelah berpikir panjang barulah diskusi dengan Desa, lalu Desa menyambut dengan baik dan itupun setelah Ibu berpikir untuk menekuni UU Desa. Saat itu saya berpikir kembali apabila Desa itu terlalu luas, mau dimulai dari mana jantung ini. Kalau hanya perempuan saja yang dimasuki ya tidak mungkin, hanya laki-laki yang dimasuki juga tidak mungkin. Karena yang saya tahu adalah masyarakat perempuan, laki-laki bahkan para remaja pun mengakui jika mereka menerima hasil politik uang tersebut. Berdasarkan testimoni itulah yang kemudian saya kira penting adalah menemukan di mana kemudian satu hal yang kolektif kolegal bisa dilakukan. Akhirnya disini muncul sebuah gerakan keluarga anti politik uang. Jadi basisnya kemudian harus dimulai dari keluarga.”
(Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Juni 2022).

Dapat dilihat ungkapan dari Ibu Zakiah sendiri yang mengatakan apabila aktor yang penting dalam gerakan ini juga turut dibantu oleh pihak keluarga. Ibu Zakiah mengatakan jika keluarga memiliki peran yang kuat jika dibandingkan

dengan mengingatkan kepada orang lain. Pada saat saya bertemu dengan ibu Zakiah, beliau juga mengatakan:

“Kami berpikir bahwa keluarga menjadi satu benteng yang bisa menjadi kelembagaan paling kecil yang bisa digunakan untuk itu dan proses saling mengingatkan di dalam keluarga itu lebih kuat dibandingkan dengan kita mengingatkan kepada orang lain. Kemudian kalau ada gerakan ibu-ibu yang dalam situasi patriarkal seperti ini, posisi ibu-ibu akan kesulitan. Kalau gerakan hanya untuk bapak-bapak kalau bapaknya juga terima pasti keluarganya juga akan terkontaminasi. Kita tidak bisa membiarkan itu.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 11 Juni 2022).

Ungkapan tersebut dikatakan oleh ibu Zakiah dan didukung dengan adanya sebuah sticker yang dipergunakan sebagai bahan untuk berkontribusi dalam gerakan Desa anti politik uang. Sambil mengeluarkan stickernya dan menyerahkan stickernya kepada saya, ibu Zakiah juga mengungkapkan pernyataan berikut:

“Akhirnya sticker-sticker ini muncul mas. Stickernya terpampang dan semuanya dibagi dan kami membaginya dipedukuhan. Kami juga membagi pada saat pertemuan ibu-ibu dan pertemuan lainnya. Kami berharap sticker-sticker yang dibagikan tersebut dapat ditempel di rumah agar setiap kali masuk rumah itu akan teringat akan pesan yang terkandung dalam sticker tersebut dan mengingatkan bahwa disinilah keluarga yang tidak akan menerima politik uang dalam bentuk apapun. Itu yang kemudian dilakukan mas.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 11 Juni 2022).

Selanjutnya, Ibu Zakiah yang juga mengatakan apabila hal tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari warga terutama ibu-ibu yang memiliki keinginan untuk menyelamatkan generasi yang akan datang. Para warga pun juga

menginginkan kegiatan politik uang ini segera di hilangkandari Desa Jatisari agar terbebas dari kegiatan yang sangat merugikan tersebut. Pada saat itu juga sticker-sticker langsung terpasang di rumah-rumah warga Jatisari beserta beberapa spanduk yang bertuliskan penolakan politik uang yang memang dipasang di dalam gang-gang di DesaJatisari.

Pada saat akan mensukseskan gerakan ini, Ibu Zakiah mula-mula masuk terlebih dahulu di Desa. Karena di dalam Desa tersebut terdapat perangkat-perangkat Desa yang turut andil dalam gerakan tersebut. Selain masuk pada perangkat Desa, ibu Zakiah bersama dengan aktor lainnya masuk ke pak dukuh kemudian masuk ke karang taruna, tujuan dari ibu Zakiah ke ranah perangkat Desa lalu ke karang taruna adalah agar mereka juga dapat berperan sebagai aktor yang mensukseskan gerakan ini. Selanjutnya, ibu Zakiah pun mengarah untuk mencoba diskusi dengan mushola dengan ibu-ibu pengajian dan takmir masjid. Ibu Zakiah pun lalu mencoba untuk menyampaikan diskusi terkait adanya gerakan anti politik uang di Desa Jatisari. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan ibu Zakiah, yaitu:

“Saya mencoba diskusi di mushola dengan ibu-ibu pengajian, takmir masjid. Menyampaikan gerakan anti politik uang dengan mengeluarkan sebuah ayat-ayat. Orangdisitu lebih mengangguk-angguk. Saya lalu berpikir di Desaada rohis, dan kemudian agen yang kemudian yang garap adalah rohis. Saya garap rohis itu sudah akhir-akhir dan sayabaru sadar kemudian kenapa rohis tidak dari dulu saya garap. Akhirnya orang harus berani ditakut-takuti apabila disini neraka tempatnya. Saat itu juga rohis digarap dengan kerja sama dengan Pandanaran untuk mengadakan pengajian rohis, sarasehan di pandanaran” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan DesaAnti Politik Uang,

09 Juni 2022).

Ungkapan tersebut dikatakan oleh Ibu Zakiah yang dimana beliau mengungkapkan apabila rohis juga dapat membantu mensukseskan gerakan Desa anti politik uang karena selain dengan rohis, ibu Zakiah juga bekerja sama dengan orang-orang Pandanaran demi gerakan Desa anti politik uang ini berjalan dengan sesuai keinginan bersama. Selain itu, Aksi yang dilakukan oleh ibu Zakiah dengan Kades dan Sekdes Desa Jatisari tentu saja juga turut dibantu oleh teman-teman KISP beserta teman-teman KKN. KISP adalah singkatan dari Komite Independen Sadar Pemilu yang merupakan sebuah kelompok yang bergerak untuk memberikan sebuah pesan-pesan moral tentang pemilu dan demokrasi kepada para masyarakat. KISP memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilu dengan tujuan agar masyarakat dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, memberikan pengetahuan kepada para masyarakat serta memberikan kesadaran agar menghindari politik uang. KISP berisikan anak-anak muda yang peduli akan permasalahan pemilu dan demokrasi yang ada di Indonesia. KISP turut andil dalam mensukseskan gerakan Desa anti politik uang di Desa Jatisari karena mereka telah memberikan sebuah sosialisasi terkait bahaya politik uang dan mereka juga berhasil memberikan sebuah panduan **“Pemilih Cerdas”**, memberikan modul Desa anti politik uang serta memberikan pendidikan politik pada 18 pedukuhan.

Selain teman-teman dari KISP, ibu Zakiah juga turut dibantu oleh teman-teman KKN dari Universitas Pancamarga yang turut membantu juga dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

“Teman-teman KKN itu masuk ke pedukuhan mas, terus ke beberapa tempat itu ya masuk. Saya juga terkadang mengingatkan kepada anak-anak KKN kalau akan melakukan sosialisasi itu disarankan untuk cek jadwal terlebih dahulu, jadi biar kalau di pedukuhan ada acara tidak berbentur dengan jadwal sosialisasi begitu.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Juni 2022).

Ungkapan tersebut adalah ungkapan yang diberikan oleh Ibu Zakiah dimana beliau memberitahukan kepada teman-teman KKN apabila akan masuk ke pedukuhan harus melihat jadwal terlebih dahulu agar pada saat akan memberikan sosialisasi di pedukuhan yang akan dimasuki sedang ada acara.

Adapun kontribusi yang diberikan Bapak Kepala Desa Jatisari beserta Bapak Sekretaris Desa adalah membuat perkades dan Ibu Zakiah yang membuat draftnya.

“Jadi Pak Kades dan Pak Sekdes yang membuat perkades, saya yang membuat draftnya dan selanjutnya nanti mereka akan memeriksa lalu kami berdiskusi bersama. Kira-kira dasar hukumnya pas atau tidak, karena basisnya Undang-Undang Desa ya saya memakai Undang-Undang Desa serta Undang-Undang tersebut merupakan kewenangan Desa atau bukan dan Desa pun berwenang untuk menentukan hal tersebut. Lalu kami menelusuri sampai disana. Dan Desa pun memiliki kewenangan tersebut. Setelah itu, Pak Kades pun menyetujui dan oke maka selanjutnya kita harus mencoba Pak, saat itu saya bilang dengan Pak Kades. Setelah semua siap, perkades itulah yang kita sebar ke pedukuhan-pedukuhan, kami tempel ke beberapa tempat yang ada disini. Hal tersebut sudah ada himbauan dari Pak Kades, jadi kalau memang anda menjadi orang Jatisari maka hindarilah dengan politik uang, jadi kira-kira seperti itu bahasa pesannya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 15 Juni 2022).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Zakiah yang pada saat itu menggerakkan

gerakan Desa anti politik uang dengan bantuan kontribusi dari bapak Kepala Desa dan bapak Sekretaris Desa Jatisari. Kontribusi yang dilakukan adalah semata mata untuk mensukseskan gerakan ini agar para masyarakat juga turut mengikuti pesan yang telah diberikan oleh pak Kades melalui perkades yang telah disebarkan di beberapa tempat yang ada di Desa Jatisari.

Pemerintah Desa Jatisari sendiri memiliki peran yang penting pada gerakan ini untuk turut mensukseskan serta untuk menjalankan fungsi dari pemerintah itu sendiri yaitu membantu apa yang menjadi permasalahan warga. Beruntungnya, masyarakat Desa Jatisari memberikan respon positif dengan adanya gerakan Desa anti politik uang tersebut. Peran yang diberikan oleh pemerintah Desa pun turut dibutuhkan untuk membantu peningkatan dan pengembangan dari gerakan Desa anti politik uang ini. Tentu saja peran yang diberikan oleh pemerintah Desa tidak hanya dari pembuatan perkades saja akan tetapi juga memfasilitasi rapat dan yang lainnya. Respon positif yang diberikan oleh masyarakat Desa Jatisari juga tentu dapat membuat pemerintah menjadi lebih maksimal kembali dalam melaksanakan gerakan Desa anti politik uang ini.

3.2 Proses pembentukan komunitas gerakan sosial Desa Anti Politik Uang

Polemik mengenai politik uang memang sudah sangat santer terdengar di kalangan masyarakat dan tampaknya memang sudah menjadi sebuah tradisi pada saat akan dilakukan Pemilihan Umum. Di Desa Jatisari inilah merupakan salah satu Desa yang turut serta memberantas politik uang dengan menerapkan sebuah landasan hukum yang memang dikhususkan untuk menolak dengan keras politik

uang di Desa Jatisari. Sebuah gerakan sosial demi memberantas Politik Uang pun saat ini sudah berjalan dengan maksimal demi terciptanya Desa Anti Politik Uang.

Desa Jatisari kini telah menjadi salah satu Desa di Kabupaten Probolinggo yang menjadi pelopor gerakan Desa anti politik uang. Hal tersebut memang menjadi sebuah kebanggaan bagi kabupaten Probolinggo karena salah satu Desanya menjadi pelopor gerakan Desa anti politik uang. Politik uang memang sudah menjadi sebuah momok saat pemilihan umum akan dilaksanakan karena hal tersebut didasari dengan unsur paksaan dan tidak dari hati dalam memilih kandidatnya.

Adapun proses yang dilakukan oleh para aktor politik yang turut andil dalam gerakan ini adalah antara lain :

a) Pra Deklarasi

Adapun pra deklarasi yang dilakukan disini adalah sebuah proses persiapan dimana gerakan tersebut akan dilaksanakan dan disahkan. Persiapan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan para masyarakat Desa untuk turut serta dalam pembentukan gerakan Desa anti politik uang di Desa Jatisari. Kegiatan pra deklarasi yang dilakukan oleh para aktor pemerintah Desa Jatisari adalah, diantaranya berikut:

b) Pembentukan Organisasi

Pembentukan organisasi dilakukan agar Desa Jatisari memiliki sebuah tim yang khusus membahas terkait Desa Anti Politik Uang yang melibatkan perwakilan masyarakat, RT, RW, Kepala Dukuh, PKK, Karang Taruna, Perangkat Desa, Muslimat, Aisyiyah, Fatayat, KISP, DEMA

STAISPA, Ponpes Kalimasada, PPDI, IDEA, IRE serta Badan Pengawas Pemilu Probolinggo. Selain itu, pembentukan organisasi ini bertujuan agar terdapat sebuah tim untuk melakukan pemahaman terkait penghindaran politik uang.

c) Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilakukan oleh pemerintah Desa Jatisari agar dapat mensukseskan gerakan tersebut serta untuk menyatukan visi dan misi agar tercipta tujuan yang sama terhadap gerakan Desa anti politik uang serta pemaparan Road Map pembentukan Desa APU. Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan perwakilan masyarakat, RT, RW, Kepala Dukuh, PKK, Karang Taruna, Perangkat Desa, Muslimat, Aisyiyah, Fatayat, KISP, DEMA STAISPA, Ponpes Kalimasada, PPDI, IDEA, IRE serta Badan Pengawas Pemilu Probolinggo.

d) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bentuk yang dilakukan dengan cara pendekatan dengan masyarakat. Sosialisasi disini dilakukan oleh teman-teman KISP dan diteruskan oleh teman-teman KKN UMY dengan memberikan pengetahuan kepada para masyarakat tentang pentingnya menghindari Politik Uang. Sosialisasi yang dilakukan di Desa Jatisari dilakukan mulai dengan tanggal 10 Januari 2018 dengan memulai pendekatan dengan masyarakat lalu dilakukannya sosialisasi di saat terdapat pertemuan RT, pertemuan ibu ibu dasawisma, pertemuan karang taruna dan yang lainnya. Sosialisasi mengenai Desa Anti Politik Uang yang berada di

Desa Jatisari bertujuan agar para masyarakat Desa Jatisari memiliki pemahaman yang luas terkait bahayanya terlibat Politik Uang. Dalam melakukan sosialisasinya, Tim Desa Anti Politik Uang Desa Jatisari juga turut memberikan sebuah pendidikan politik yang telah dilaksanakan di 18 padukuhan.

e) Deklarasi

Deklarasi dilakukan setelah adanya proses pra deklarasi dilakukan. Pada tahap ini, pemerintah Desa Jatisari melakukan deklarasi setelah mendapatkan dukungan dari masyarakat dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo bahwa Desa Jatisari menjadi salah satu Desa penggerak Desa anti politik uang. Deklarasi yang dilaksanakan di Desa Jatisari bertujuan untuk mencegah terjadinya upaya menciderai Pemilu Serentak 2022 dengan perilaku tidak bermoral, seperti adanya politik uang dan untuk memberikan kesadaran tentang demokrasi dan politik yang bermartabat. Dalam pelaksanaan Deklarasi ini juga mengundang 16 Parpol, DPD, dan Tim Pemenangan Capres/Cawapres serta mensosialisasikan program TAMU JAMAK singkatan dari *Tunjukan Mukamu Jelaskan Maksudmu*, sebagai wadah untuk memberikan pemaparan caleg berdasarkan Parpoldan DPD serta Tim Pemenangan Capres/ Cawapres dan dihadiri juga oleh Komisioner BAWASLU Pusat Frits Edward Siregar. Setelah sesi TAMU JAMAK Deklarasi dilanjutkan oleh Penandatanganan Pakta Integritas Oleh Caleg, perwakilan dari 18 Padukuhan dan

Penyelenggara Pemilu. Kemudian acara Deklarasi Diakhiri dengan pembagian sticker “ Keluarga Anti Politik Uang” dari Kepala Desa Jatisari kepada Seluruh Perwakilan RT dari 18 Padukuhan

f) Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jatisari adalah bertujuan untuk memberikan pelatihan serta pemahaman yang lebih dalam terkait Desa anti politik uang. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat memahami tentang baiknya menghindari politik uang. Selain itu, bimbingan teknis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman juga kepada para aktor politik yang ikut terlibat untuk memberikan materi kepada masyarakat tentang bahayanya politik uang. Bimbingan teknik juga sempat dilakukan di Ruang Aula Kampus yang di inisiasi oleh teman-teman KISP

g) Aksi Bersama

Aksi bersama yang ada di Desa Jatisari merupakan tindakan yang juga penting di lakukan karena hal tersebut dapat memberikan pengetahuan terkait peningkatan masyarakat yang turut andil dalam pelaksanaan Desa anti politik uang ini. Pemerintah Desa Jatisari berusaha untuk tetap menyatukan masyarakat agar dapat mencapai satu tujuan yaitu menjadikan Desa Jatisari menjadi Desa anti politik uang. Aksi bersama ini diharapkan dapat terlaksana dengan lancar dan baik dengan adanya keikutsertaan masyarakat bersama para aktor politik untuk mencapai tujuan yang sama. Adapun bentuk-bentuk aksi bersama yang dilakukan di Desa Jatisari antara

lain adalah :

h) Adanya Media Sosialisasi

Media sosial menjadi salah satu media untuk membantu yang dinilai penting untuk mensukseskan gerakan Desa anti politik uang. Media sosial saat ini menjadi alat bantu untuk mensosialisasikan gerakan yang ada di Desa Jatisari tersebut. Media sosial yang digunakan oleh Desa Jatisari antara lain berbentuk seperti facebook panduan “pemilih cerdas” modul Desa Anti Politik Uang, spanduk serta alat bantu lainnya. Dalam hal ini, Karang taruna Desa Jatisari cukup aktif dalam membantu mensosialisasikan gerakan Desa anti politik dengan melalui website.

i) Posko Pengaduan Terpadu

Posko pengaduan dibentuk oleh Bawaslu Probolinggo yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menjadi wadah yang dapat menampung segala laporan negatif maupun laporan positif yang memiliki keterkaitan dengan politik uang. Posko pengaduan tersebut juga dibuat untuk menyediakan tempat bagi masyarakat maupun aktor pemerintah yang akan melakukan pengaduan terkait politik uang di Desa Jatisari.

3.3 Pasang surut dukungan terhadap ide gerakan Desa Anti Politik Uang

Gerakan Desa anti politik uang merupakan sebuah gerakan nyata yang memiliki tujuan untuk memberantas kegiatan politik uang di Desa-desa.

Karenanya, gerakan Desa anti politik uang ini diciptakan di Desa Jatisari salah satunya untuk mengurangi tindak politik uang yang sedang terjadi di Indonesia.

Sebenarnya, memang persoalan mengenai politik uang ini sudah lama terjadi dan saat ini Desa Jatisari sudah mulai untuk menerapkan Desa anti politik uang. Dalam pembuatan gerakan ini tentu saja pernah mengalami pasang surut, sama halnya dengan Ibu Zakiah bersama dengan pemerintah Desa Jatisari serta pihak yang terlibat pada saat membuat sebuah gerakan Desa anti politik. Adapun Ibu Zakiah mengungkapkan terkait pasang surut yang terjadi di Desa Jatisari yaitu,

“Kalau dibilang pasang surutnya itu ya kita tidak menargetkan ya mas. Pada saat itu saya bersama dengan bapak Kepala Desa dan bapak Sekretaris Desa mengatakan bahwa puncak dari kegiatan ini bukan saat deklarasi, sehingga semua sel yang dimasuki tidak ada puncaknya. Jadi semuanya adalah puncak. Memang di beberapa Desa atau tempat itu setelah deklarasi sudah selesai. Berbeda dengan kita, kita tidak menganut itu. Hal itu ya karena ada target kerja kami sampai dengan hari H pencoblosan. Jadi ya pasang surutnya itu ya pada saat tidak ada yang berusaha untuk bergerak menggerakkan. Seperti misal Bapak Dukuh sudah diberikan materi terkait politik uang tetapi beliau tidak bisa menyebarkan sendiri, dan hal itu harus didampingi oleh saya, bapak Kepala Desa Jatisari, sekretaris Desa ataupun anak-anak KKN yang akan masuk dalam penyelenggaraan sosialisasi.”(Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Juni 2022).

Ungkapan tersebut diungkapkan oleh Ibu Zakiah yang mengungkapkan apabila pasang surut yang dialami oleh Desa Jatisari ketika mensukseskan gerakan ini adalah ketika tidak ada orang yang berusaha untuk bergerak atau berusaha tergugah kesadarannya untuk berpartisipasi dalam gerakan ini. Ibu Zakiah juga mengungkapkan jika pada saat itu memang banyak warga yang mengandalkan Ibu Zakiah bersama dengan bapak Kepala Desa Jatisari dalam menggerakkan gerakan tersebut tanpa ada inisiatif dari mereka untuk mensosialisasikan Desa anti politik

uang sendiri, padahal memang sebelumnya mereka sudah diberikan materi terkait hal tersebut.

Pada saat diadakan sosialisasi bersama dengan ibu Zakiah dan teman-teman KISP terdapat salah satu warga yang bertanya terkait mengapabukan Bawaslu yang memberikan sosialisasi padahal hal tersebut merupakan tugas bawaslu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memang sudah ditunjukan bawaslu agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang politik uang. Selain itu juga dijelaskan apabila Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan Bawaslu tidak hanya dijadikan sebagai pengawas saja akan tetapi juga ditunjuk sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Bawaslu memiliki peran yang penting dalam pemilihan umum yaitu sebagai pengawal untuk kegiatan tersebut dalam pembuktian peran serta eksistensi yang dilakukan (Baihaki, 2018).

Di Desa Jatisari, sebenarnya hal tersebut merupakan sebuah kritik terbesar yang di tujukan kepada Bawaslu. Kritik tersebut ditujukan karena sosialisasi tidak pernah dilakukan dan hanya mengandalkan para volunter saja. Apabila dilihat memang kenyataannya kinerja Bawaslu belummaksimal dalam memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat Desa Jatisari. Padahal, sosialisasi itu sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang sadar akan bahaya politik uang. Sosialisasi memang sangatdibutuhkan karena mengingat masyarakat yang masih awam dengan masalah politik uang. masyarakat banyak yang menganggap jika masalah ini sering terjadi tetapi mereka tetap saja melakukannya. Maka dari itu

sosialisasi dari pihak Bawaslu khususnya sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat tersadar dengan bahaya politik uang.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Desa Jatisari pun belum sepenuhnya mengetahui mengenai komisioner yang datang di Desa Jatisari. Ibu Zakiah berpikir jika beliau dalam memilih tersebut salah dalam menyeleksi, padahal sebelumnya beliau berharap jika bisa lebih baik lagi kinerja dari komisioner tersebut. Sebenarnya komisioner itu ada, akan tetapi dalam memberikan sosialisasi tersebut kurang maksimal dalam memberikannya, akibatnya para masyarakat pun asing terhadap para komisioner tersebut. Namun, apabila tupoksi pada komisioner tersebut diwajibkan seharusnya di wilayahnya itu ya memang harus dilakukan dan divisi tersebut akan muncul. Ibu Zakiah pun menanggapi akan hal tersebut dengan ungkapan sebagai berikut,

“Tapi nampaknya semua tupoksi selalu ditarik orang ke atas dan tidak pernah didorong untuk membumi, sehingga komisioner berbasis dari gerakan bawah dan komisioner tersebut lebih kepada jabatan yang kemudian mereka itu mengikuti seleksi dengan prasyarat yang teknokratif begitu, harus ada surat keterangan dari pengadilan dll, tetapi basis gerakannya tidak terkoordinir. Meskipun saat itu juga kita sudah seleksi dan sudah saya tanya apakah mempunyai basis gerakan atau tidak, walaupun punya mau dimulai darimana, secara wawancara memang sudah oke tapi realnya tidak.”
(Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 15 Juni 2022).

Apabila dilihat kembali, dalam melaksanakan gerakan Desa anti politik uang tentu saja melalui proses yang panjang seperti membuat deklarasi serta sebuah strategi dan perencanaan juga. Tetapi, lain halnya dengan Desa diluar Desa Jatisari yang hanya melaksanakannya hanya sampai dengan deklarasi saja

tanpa ada tindak lanjut. Di Desa Jatisari, ibu Zakiah beserta pemerintah Desa Jatisari membentuk gerakan Desa anti politik uang dengan proses deklarasi sampai dengan pembuatan roadmap. Ibu Zakiah memaparkan pada saat itu apabila di Desa Jatisari memerlukan sebuah roadmap yaitu agar dapat memiliki strategi yang teratur dan perencanaan yang matang. Seperti contohnya apabila Desa Jatisari memiliki cita-cita agar terhindar dari politik uang maka pemerintah Desa Jatisari sudah mengetahui arah mana yang akan ditempuh, dan cara yang dilakukan tersebut haruslah melihat dari sebuah roadmap yang dapat menuntun untuk dapat tercapai cita-cita tersebut.

Dalam membangun basis gerakan untuk Desa anti politik karena memang gerakan tersebut diperuntukan untuk daerah yang berada di Desa maka memang basisnya itu dimulai dari bawah atau bisa dikatakan bergerak dari bawah. Dan seperti yang di jelaskan jika di Desa Jatisari memang sudah dibuat roadmap dimana isinya sudah jelas apabila target utama yang dipilih oleh pemerintah Desa Jatisari beserta ibu Zakiah adalah keluarga. Keluarga dianggap mampu memberikan pengaruh lebih besar untuk gerakan Desa anti politik uang ini. Sebagian orang memang dianggap masih banyak yang merasa kebingungan tentang calon anggota politik, hal tersebut dibuktikan dengan ungkapan ibu Zakiah berikut ini,

“Orang-orang itu banyak yang kebingungan untuk menentukan pilihan karena memang banyak calon-calon yang tidak diketahui, pada saat diadakan deklarasi tidak dijelaskan semuanya hanya sebagian saja. Nah akibatnya orang-orang bingung untuk memilih dan orang-orang seperti itulah yang mudah untuk dimasuki oleh politik uang. Mereka itu memiliki handphone android tapi tidak *aware* dengan sosial media. Akibatnya membuat masyarakat menerima informasi yang dirasa kurang. Hal

tersebut yang memang menjadi evaluasi terbesar.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Oktober 2019).

Terkait ungkapan ibu Zakiah terkait masyarakat Desa Jatisari yang memang kurang *aware* terhadap sosial media mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui informasi terkait calon-calon yang akan maju dalam pemilihan umum. Dan sebagai evaluasinya adalah seharusnya memang dari pihak KPU sendiri kedepannya memang harus turun tangan untuk mendorong para calon legislatif memberikan sosialisasi ataupun memperkenalkan identitas mereka sebagai calon legislatif. Hal tersebut memang sebenarnya susah untuk dilakukan karena untuk menyadarkan masyarakat tersebut tentu saja tidak mudah, memerlukan proses yang memang cukup lama. Di Desa Jatisari sendiri, ibu Zakiah juga sempat mengeluhkan terkait masyarakat yang masih terbawa kebiasaan lama yaitu masih sering menerima politik uang dari calon legislatif untuk menentukan pilihannya. Seperti misalnya kalimat “Wani piro aku kon milih kowe?”, hal seperti itulah yang terkadang masih terjadi di kalangan masyarakat yang masih terbuai dengan politik uang.

C. Interpretasi Data

Masyarakat menurut (Koentjaraningrat, 2009: 115 118) adalah sekelompok orang yang didalamnya saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Masyarakat sendiri dalam bahasa inggris berarti *society* serta dalam bahasa Arab berarti *syaraka* yang artinya adalah berpartisipasi atau ikut serta. Masyarakat disini memiliki peran yang penting untuk mensukseskan gerakan Desa Anti

Politik Uang ini. Dengan adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah Desa Jatisari dalam menanggulangi politik uang di Desa Jatisari.

Untuk upaya proses pembentukan gerakan Desa Anti Politik Uang tidak terlepas oleh sikap tanggap dari Ibu Zakiah yang turut membantu dalam pembentukan gerakan tersebut. Adapun cara yang ditempuh oleh ibu Zakiah beserta aktor politik yang terlibat adalah dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh ibu Zakiah beserta aktor politik lainnya yaitu dengan memberikan pemahaman yang matang terkait pentingnya menghindari politik uang saatakan dilangsungkan pemilihan umum.

Pemerintah Desa Jatisari memberikan pemahaman tentang Desa Anti Politik Uang antara lain adalah kepada para masyarakat Desa Jatisari, para pelajar, para pemilih pemula yang pemahamannya dirasa masih kurang, karang taruna Desa Jatisari, PPDI, dan kepada penyandang difabel. Pemerintah Desa Jatisari pada saat itu memiliki harapan agar kelompok diatas dapat memberikan dukungan yang kuat untuk mewujudkan Desa Jatisari menjadi Desa Anti Politik Uang.

Menurut ibu Zakiah, metode paling ampuh untuk memperluas jaringan adalah dengan mengajak mereka untuk mendukung kegiatan gerakan ini. Semisal terdapat acara di Desa tersebut maka kesadaran masyarakat adalah dengan cara memberikan stiker-stiker ataupun pemahaman terkait Desa anti politik tersebut. Untuk masyarakat yang turut andil dalam kegiatan tersebut juga disarankan untuk memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakat yang masih belum mengetahui terkait gerakan yang sudah dijalankan di Desa Jatisari. Adapun

kegiatan tersebut adalah dengan menyuruh masyarakat untuk memasang stiker-stiker disekitar rumah mereka agar mereka dapat selalu mengingat akan slogan tersebut. Beberapa langkah-langkah kecil inilah yang senantiasa akan menyadarkan masyarakat agar dapat tersadarkan dan menghindari kegiatan politik uang.

Dalam mengupayakan perluasan keterlibatan masyarakat di Desa Jatisari adalah salah satunya memang terdapat di pedukuhan. Hal tersebut karena di dalam pedukuhan tersebut terdapat masyarakat yang dinilai mampu untuk mensukseskan gerakan ini. Cara yang dilakukan adalah dengan masuk ke dalam kelompok perempuan yaitu di grup PKK ataupun dasawisma. Selain itu juga dapat masuk di dalam kelompok para remaja yaitu grup Karang Taruna. Menurut Ibu Zakiah, pada saat kelompok Karang Taruna di Desa Jatisari sedang menghadapi perlombaan maka banyak teman-teman dari Karang Taruna tersebut tidak dapat ikut aktif, akan tetapi juga ada beberapa dari anggota Karang Taruna tersebut yang ikut terlibat dalam proses membangun gerakan Desa Anti Politik Uang.

Untuk perluasan yang lainnya, Ibu Zakiah mengatakan bahwa perluasan jaringan yang lainnya adalah dari Rois.

“Perluasan yang lain adalah melalui Rois. Setelah kami analisis, kelompok keagamaan dianggap sebagai kelompok yang perlu dikuatkan keberadaannya karena bicara anti politik uang pada akhirnya warga percaya bahwa ini diharamkan dan dari situ kemudian legitimasi dari para Kiai dari para Rois menjadi sangat penting untuk kemudian bisa menyebarluaskan ini di kelompok-kelompok keagamaan. Roislah yang kemudian masuk ke Mushola-mushola. Roislah yang masuk di acara-acara keagamaan. Dan dari sanalah kelompok-kelompok masyarakat tersebut akan mendengar legitimasi terkait agama yang kemudian

konsep dari anti politik uang berada pada kontes keagamaan yang didalamnya menjelaskan bahwa hal tersebut adalah haram dilakukan” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 11 Juni 2022).

Melihat ungkapan yang diberikan oleh ibu Zakiah bahwa rois menjadi salah satu faktor perluasan jaringan karena rois dapat memberikan dampak yang baik untuk gerakan tersebut. Penyebaran gerakan Desa anti politik uang melibatkan rois karena nantinya rois sendiri akan memberikanceramah-ceramah kepada masyarakat terkait bahaya politik uang. Rois dinilai banyak memberikan dampak yang baik bagi Desa Jatisari karena rois sering melakukan dakwah-dakwah kepada masyarakat dan roispun juga dinilai dapat mengembangkan perluasan jaringan terhadap keterlibatannya dalam gerakan Desa anti politik uang.